

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara

Klemens Petrus Kodon
klemenskodon@gmail.com
Otniel Safkaur
Risky Novan Ngutra
Hesty T. Salle

Abstract

This study aims to analyze the factors that affect the value of financial reporting information. Factors that affect the value of financial reporting information are measured by variables of human resource quality, information technology utilization, internal control systems, regional financial supervision. The research approach used is associative. The sampling technique used in this study was a saturated sample with the number of respondents as many as 60 people at the Regional Financial and Asset Management Agency of Tolikara Regency. Data collection is carried out by distributing questionnaires. Data analysis using multiple linear regression with the help of SPSS. This study provides results that partially human resources, the use of information technology and regional financial supervision do not have a significant effect on the value of financial reporting information, while the internal control system has a positional effect on the value of financial reporting information. Human resources, internal control systems, the use of technology and information, and regional financial supervision simultaneously affect the value of financial reporting information.

Keywords: human resources, utilization of information technology, internal control system, regional financial supervision, value of financial reporting information

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan diukur dengan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 60 orang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara parsial sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh posisional terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi dan informasi, serta pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Kata Kunci: sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan daerah, nilai informasi pelaporan keuangan

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan nilai informasi laporan keuangan publik. Nilai informasi laporan keuangan dapat

diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Nilai informasi laporan keuangan dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Yusuf, 2015).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan nilai informasi laporan pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa nilai informasi laporan keuangan merupakan dasar pelaporan keuangan dipemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan

keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023, opini audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Tolikara dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Tolikara

No	Tahun	Opini
1	2017	Disclaimer
2	2018	Disclaimer
3	2019	Wajar Dengan Pengecualian
4	2020	Wajar Dengan Pengecualian
5	2021	Wajar Tanpa Pengecualian

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tolikara telah menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini bisa dilihat dari pencapaian opini yang diberikan oleh BPK yakni opini WTP. Namun secara keseluruhan, LKPD Kabupaten Tolikara selama 4 tahun terakhir belum memadai karena perolehan opini Disclaimer dua kali berturut-turut tahun 2017 dan tahun 2018 serta opini WDP juga berturut-turut tahun 2019 dan tahun 2020. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini dari Disclaimer ke WDP dan WTP namun pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan BKAD, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan BKAD, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan BKAD, (4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan BKAD, dan (5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan BKAD.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tolikara yang beralamat di Kompleks Perkantoran Igari Karubaga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data lapangan. Data lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda yang

dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Uji yang dilakukan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian Uji analisis deskriptif dengan software SPSS menunjukkan bahwa nilai dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi dari variabel sumber daya manusia adalah item pertanyaan X1.6 yaitu 4,50 dan rata-rata terendah adalah item pertanyaan X1.12 yaitu 4,07. Sedangkan, nilai rata-rata dari setiap item pertanyaan variabel sumber daya manusia adalah 4,30 yang berarti bahwa sumber daya manusia dalam kategori setuju.

Berdasarkan hasil pengujian Uji analisis deskriptif dengan software SPSS menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah item pertanyaan X2.1, X2.2, X2.5, X2.12 yaitu 4,37 dan rata-rata terendah adalah item pertanyaan X2.7 yaitu 4,10. Sedangkan, nilai rata-rata dari setiap item pertanyaan variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 4,27 yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kategori setuju.

Berdasarkan hasil pengujian Uji analisis deskriptif dengan software SPSS menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi dari variabel sistem pengendalian intern adalah item pertanyaan X3.5 yaitu 4,40 dan rata-rata terendah adalah item pertanyaan X3.12 yaitu 4,07. Sedangkan, nilai rata-rata dari setiap item pertanyaan variabel sistem pengendalian intern adalah 4,24 yang berarti bahwa sistem pengendalian intern dalam kategori setuju.

Berdasarkan hasil pengujian Uji analisis deskriptif dengan software SPSS menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi dari variabel pengawasan keuangan daerah adalah item pertanyaan X4.2 yaitu 4,38 dan rata-rata terendah adalah item pertanyaan X4.11 yaitu 4,10. Sedangkan, nilai rata-rata dari setiap item pertanyaan variabel pengawasan keuangan daerah adalah 4,23 yang berarti bahwa pengawasan keuangan daerah dalam kategori setuju

Berdasarkan hasil pengujian Uji analisis deskriptif dengan software SPSS menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi dari variabel nilai informasi pelaporan keuangan adalah item pertanyaan Y.4 dan Y.5 yaitu 4,35 dan rata-rata terendah adalah item pertanyaan Y.3 yaitu 4,17. Sedangkan, nilai rata-rata dari setiap item pertanyaan variabel nilai informasi pelaporan keuangan adalah 4,25 yang berarti bahwa nilai informasi pelaporan keuangan dalam kategori setuju

Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas variabel X1.1, X1.8 dan X2.8 memiliki nilai signifikansi > 0,05 serta nilai $r_{tabel} > r_{hitung}$ sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga item pernyataan tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan dari penelitian. Setelah itu dilakukan pengujian ulang terhadap item pertanyaan yang valid. Berdasarkan hasil pengujian ulang (Lampiran 1) dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam penelitian dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi < 0,05 dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha semua instrumen penelitian > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut, semua instrumen yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap variabel dinyatakan valid dan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

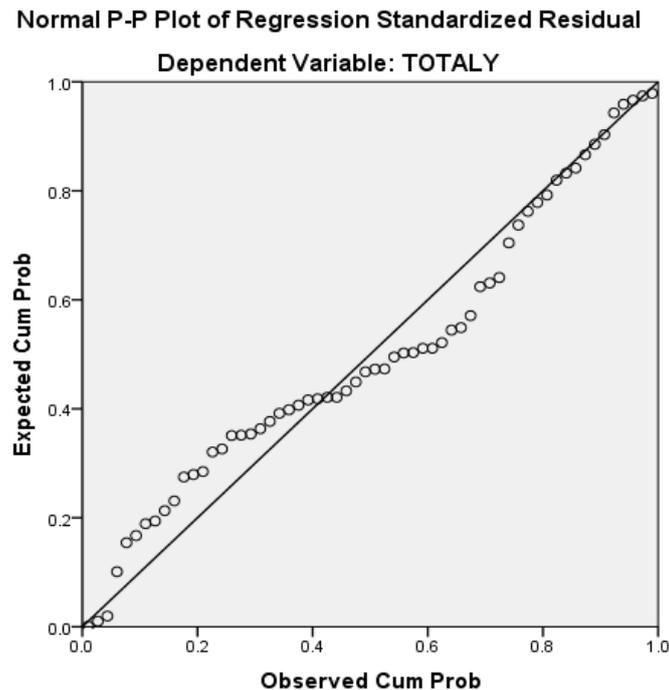
Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.66974886
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.899
Asymp. Sig. (2-tailed)		.394

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Gambar 1. Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas dengan kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar $0,394 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan, secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa model regresi yang dihasilkan berdistribusi normal. Hal tersebut terlihat melalui sebaran data residual yang berada disekitar garis diagonal (garis linear).

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

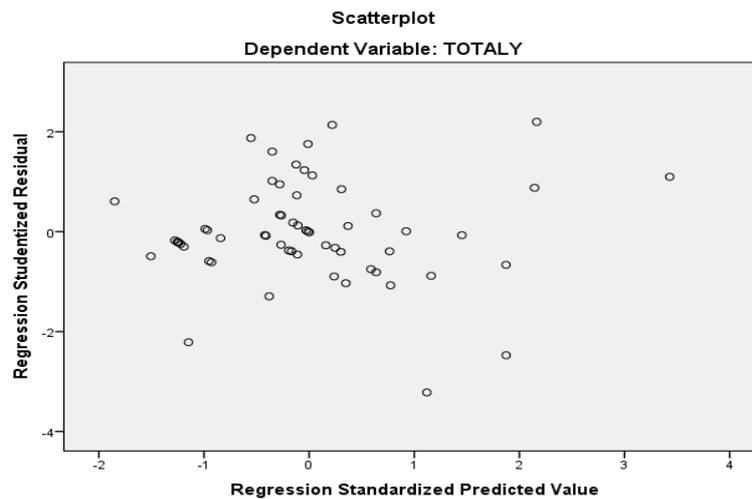
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.424	6.015		.902	.371		
	TOTALX1	.021	.103	.021	.207	.837	.696	1.438
	TOTALX2	.216	.119	.203	1.816	.075	.555	1.802
	TOTALX3	.572	.122	.598	4.685	.000	.424	2.356
	TOTALX4	.067	.122	.060	.544	.589	.558	1.791

a. Dependent Variable: TOTALY

Berdasarkan hasil tabel di atas, didapatkan hasil bahwa nilai tolerance pada variabel X1 $0,696 > 0,1$ dan VIF $1,438 < 10$. Variabel X2 nilai tolerance $0,555 > 0,1$ dan VIF $1,802 <$

10, kemudian variabel X3 nilai tolerance 0,424 > 0,1 dan VIF 2,356 < 10 serta variabel X4 nilai tolerance 0,558 > 0,1 dan VIF 1,791 < 10. Maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.



Gambar 2. Grafik hasil uji heterokesdastisitas

Berdasarkan gambar hasil uji heterokesdastisitas dengan grafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar tidak beraturan secara acar di atas 0 maupun di bawah 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokesdastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

Hasil Uji Parsial

Tabel 4. Hasil Uji Parsial

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.424	6.015		.902	.371		
	TOTALX1	.021	.103	.021	.207	.837	.696	1.438
	TOTALX2	.216	.119	.203	1.816	.075	.555	1.802
	TOTALX3	.572	.122	.598	4.685	.000	.424	2.356
	TOTALX4	.067	.122	.060	.544	.589	.558	1.791

a. Dependent Variable: TOTALY

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Sumber Daya Manusia diperoleh hasil nilai thitung 0,207 < 2,004 dengan signifikansi 0,837 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa

H1: Ditolak, Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diperoleh hasil nilai thitung $1,816 < 2,004$ dengan signifikansi $0,075 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H2: Ditolak, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Sistem Pengendalian Intern diperoleh hasil nilai thitung $4,685 > 2,004$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H3: Diterima, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel Pengawasan Keuangan Daerah diperoleh hasil nilai thitung $0,544 < 2,004$ dengan signifikansi $0,589 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H4: Ditolak, Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan.

Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	268.488	4	67.122	22.443	.000 ^b
	Residual	164.496	55	2.991		
	Total	432.983	59			

a. Dependent Variable: TOTALY

b. Predictors: (Constant), TOTALX4, TOTALX1, TOTALX2, TOTALX3

Berdasarkan tabel di atas nilai $f_{hitung} 22,443 > f_{tabel} 2,54$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H5: Diterima**. Artinya, variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.620	.592	1.729

a. Predictors: (Constant), TOTALX4, TOTALX1, TOTALX2, TOTALX3

b. Dependent Variable: TOTALY

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,592, hal ini berarti variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah dapat menjelaskan variabel nilai informasi laporan keuangan sebesar 59,2 %, sedangkan sisanya 40,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Pengujian pengaruh variabel sumber daya manusia terhadap variabel nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara, artinya meningkatkan variasi kompetensi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD. Hal ini bisa saja terjadi karena kondisi sub bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan yang belum mendukung.

Pengaruh sumber daya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip nilai informasi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Hasil pengujian statistik ini tidak sejalan dengan hasil analisis deskriptif tanggapan responden yang secara rata-rata memberikan nilai 4,30 atau masuk dalam kategori setuju yang menyatakan bahwa responden setuju kualitas sumber daya manusia mempengaruhi nilai

informasi pelaporan keuangan. Nilai terbesar pada pernyataan/indikator X1.6 (4,50) yaitu Pelatihan baik dalam negeri maupun di luar negeri untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan pegawai sangat diperlukan dan nilai terendah pada pernyataan/indikator X1.2 (4,08) yaitu Penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian Launtu (2021) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun hasil ini sejalan dengan penelitian Anshori (2018), Putri et al., (2020), Widyawati & Ismunawan (2022) yang memberikan hasil bahwa pegawai yang tidak berkompeteren atau berkompeteren tidak mempengaruhi terjadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini relevan dengan kondisi yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara, bahwa untuk mendukung pelaksanaan kinerja pemerintah Kabupaten Tolikara lebih khusus di BPKAD perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Daerah Kabupaten Tolikara yang menyatakan bahwa permasalahan pertanggungjawaban dana JKN belum tertib dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berstatus ASN yang mampu ditugaskan sebagai bendahara.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Pengujian pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara. Hasil pengujian statistik ini tidak sejalan dengan hasil analisis deskriptif tanggapan responden yang secara rata-rata

memberikan nilai 4,27 atau masuk dalam kategori setuju yang menyatakan bahwa responden setuju pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan.

Nilai terbesar pada pernyataan/indikator X2.1 (4,37) Setiap Subbagian pada BPKAD memiliki computer yang cukup untuk melaksanakan tugas, X2.2 Jaringan internet telah terpasang dengan baik di unit kerja anda, dan X3.3 Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan nilai terendah pada indikator X2.7 (4,10) Komputer yang digunakan bebas dari segala gangguan seperti virus ataupun kinerjanya lambat. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Tolikara khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah diterapkan dalam berbagai kebijakan, penyusunan program dan anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penerapan teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah. Namun sedikit terkendala karena dari Website Kabupaten Tolikara <https://tolikarakab.go.id>, maka nampak terlihat bawah kualitas jaringan di Kabupaten Tolikara kurang maksimal sehingga segala informasi kepada publik tidak bisa diakses secara bebas atau masih terbatas sementara untuk jaringan internet BPKAD sendiri cukup maksimal dalam pengelolaan anggaran yang ada.

Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Pengujian pengaruh variabel sistem pengendalian intern terhadap variabel nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Dewi et al., 2019; Putri et al., 2020; Sandanafu & Situmeang, 2018; Widyawati & Ismunawan, 2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, yang berarti sistem pengendalian intern yang dijalankan pada BPKAD Kabupaten Tolikara telah dijalankan secara optimal.

Pentingnya aspek sistem pengendalian intern diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan nilai informasi laporan keuangan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern adalah seperangkat kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan di pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan, peraturan, dan prinsip akuntansi yang berlaku. Penerapan Sistem Pengendalian Intern memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern juga membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya mekanisme pengendalian yang tepat, kesalahan dan kecurangan dalam pencatatan dan pelaporan dapat diminimalisasi, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan (Watopa et al., 2023).

Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolikara secara keseluruhan sudah memadai, begitupula secara khusus di BPKAD sudah pengendalian intern sudah optimal dijalankan. Indikator dengan penilaian terendah diberikan berkaitan dengan Penilaian Resiko (Risk Assessment). BPKAD belum sepenuhnya memiliki ketegasan mengenai tolak ukur dalam mendorong akuntabilitas kerja pegawai, yang ditunjukkan dengan kurang disiplin untuk berkantor.

Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Pengujian pengaruh variabel pengawasan keuangan daerah terhadap variabel nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara. Hasil ini tidak mendukung penelitian (Anshori, 2018; Dewi et al., 2019; Putri et al., 2020; Widyawati & Ismunawan, 2022) yang

hasilnya bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Apabila ditemukannya sebuah kekeliruan atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Hasil pengujian statistik ini tidak sejalan dengan hasil analisis deskriptif tanggapan responden yang secara rata-rata memberikan nilai rata-rata 4,23 yang berada pada kategori setuju dengan semua item pernyataan pada variabel pengawasan keuangan daerah. Hasil ini juga tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di BPKAD Kabupaten Tolikara. Dari segi laporan keuangan, BPKAD telah melampirkan pencatatan transaksi dan disertai dengan dokumentasi bukti transaksi. Hal ini sangat menentukan kualitas dari laporan keuangan yang dikerjakan. Pengawasan akan pembuatan laporan juga konsisten dilakukan demi menjaga kualitas serta kepercayaan masyarakat.

Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Pengujian pengaruh variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan terhadap variabel nilai informasi pelaporan keuangan pada BKAD Kabupaten Tolikara menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada

BKAD Kabupaten Tolikara. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Inayati, 2018; Putri et al., 2020; Sandanafu & Situmeang, 2018) memberikan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah harus berjalan bersama-sama. Kompetensi sumber daya manusia yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, diklat dan sebagainya akan mampu meningkatkan kinerja kompetensi dan kemampuan pegawai sehingga dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Begitu pula dengan pemanfaatan teknologi informasi, yang mana teknologi ini dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu, ketika ada teknologi yang baru diharapkan agar dapat disosialisasikan dan dipraktekkan kepada pegawai yang mengoperasikannya, sehingga membantu untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang akhirnya akan berdampak pada laporan keuangan yang berkualitas yakni andal dan tepat waktu. Selain kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah juga harus sama-sama dijalankan dengan maksimal baik oleh pimpinan maupun pegawai sehingga akhirnya dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di BPKAD Kabupaten Tolikara masih kurangnya sumber daya manusia yang berstatus ASN yang mampu ditugaskan sebagai bendahara. (2) Pemanfaatan teknologi dan informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hal ini mungkin terjadi karena kualitas jaringan di Kabupaten Tolikara

kurnag maksimal yang membuat Website Kabupaten Tolikara <https://tolikarakab.go.id> susah diakses, sehingga segala informasi kepada publik tidak bisa diakses secara bebas atau masih terbatas sementara untuk jaringan internet BPKAD sendiri cukup maksimal dalam pengelolaan anggaran yang ada. (3) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolikara secara keseluruhan sudah memadai, begitupula secara khusus di BPKAD sudah pengendalian intern sudah optimal dijalankan. (4) Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hasil ini juga tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di BPKAD Kabupaten Tolikara, karena pengawasan akan pembuatan laporan juga konsisten dilakukan demi menjaga kualitas serta kepercayaan masyarakat. (5) Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi dan informasi dan Pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2).
- Anshori, M. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 66–77.
- Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Universitas Diponegoro.
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Dewi, K. S., Cipta, W., & Bagia, I. W. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *E-Journal S1 Ak*

- Universitas Pendidikan Ganesha, 7.*
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inayati, S. R. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur). *Journal Ilmiah Rinjani, 6*(1).
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah, 18*(1).
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4*(1).
- Manimpurung, R., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13*(02).
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Putri, U. A., Hafidhah, H., & Firmansyah, I. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Sumenep. *Journal Of Accounting and Financial, 1*(1).
- Sandanafu, S. P., & Situmeang, M. F. (2018). Pengaruh Kapasitas Sdm, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Maneksi, 7*(2).
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Allo Layuk, P. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 3*(1).
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Layuk, P. K. A. (2018). Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 3*(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 10). CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Watopa, M. A., Kambu, A. A., & Ngutra, R. N. (2023). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompotensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Study Empiris Pada Kabupaten Waropen)*. Universitas Cenderawasih.
- Widyawati, M. J., & Ismunawan. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 1*(6).